

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwa sistem pengumpulan sampah di Kecamatan Singosari masih belum efektif secara keseluruhan, dan menimbulkan *illegal dumping* di Kecamatan Singosari. Selain itu, hasil dari identifikasi lokasi *illegal dumping* dan evaluasi *illegal dumping* adalah berupa ciri-ciri dari *illegal dumping*. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya *illegal dumping* berdasarkan hasil analisis regresi linier didapati 6 variabel yang mempengaruhi, Hasil ini didasarkan pada beberapa temuan meliputi:

A. Kinerja Sistem Pengumpulan Sampah di Kecamatan Singosari

Kinerja sistem pengumpulan sampah di Kecamatan Singosari masih tidak efektif. Berdasarkan analisis efektifitas sistem pengumpulan persampahan, didapatkan bahwa jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kecamatan Singosari adalah sebesar $484,31\text{m}^3$, sedangkan untuk kapasitas atau kemampuan petugas kebersihan dalam mengangkut sampah menuju TPS adalah sebesar $362,88\text{m}^3$, sehingga terdapat selisih yaitu sebesar $121,430\text{m}^3$. Selisih tersebut terbagi dari volume sampah yang masyarakat buang ke sungai dan dibakar sebesar $28,71\text{m}^3$, dan juga menimbun sampah pada lahan tertentu atau *illegal dumping* sebesar $92,72\text{m}^3$. Sehingga sistem pengumpulan sampah di Kecamatan Singosari masih belum efektif.

B. Identifikasi lokasi dan evaluasi kondisi *illegal dumping*

Terdapat sembilan titik *illegal dumping* yang tersebar di Kecamatan Singosari. Titik-titik *illegal dumping* tersebut terdapat di Desa Klampok, Desa Watugede, Desa Purwoasri, Desa Lang-lang, dan Desa Baturetno. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel persebaran *illegal dumping* di Kecamatan Singosari.

Pada masing-masing titik *illegal dumping* memiliki volume yang berbeda, berdasarkan hasil survei terdapat 9 lokasi *illegal dumping* di Kecamatan Singosari yang tersebar di beberapa kecamatan. Volume *illegal dumping* terbesar berada di lokasi Desa Purwoasri yaitu sebesar $86,4\text{m}^3$, Desa Purwoasri memiliki 3 titik *illegal dumping* yang mana salah satunya merupakan volume terbesar yaitu $86,4\text{m}^3$, sedangkan kedua titik lainnya memiliki volume masing-masing sebesar $0,52\text{m}^3$ dan $1,44\text{m}^3$. Pada desa lainnya yaitu Desa Baturetno terdapat 2 titik *illegal dumping* yang letaknya dekat dengan sebuah permukiman. Volume dari masing-masing titik *illegal dumping* adalah $0,36\text{m}^3$ dan $0,54\text{m}^3$.

Terdapat 4 titik illegal dumping lainnya yaitu masing-masing 2 titik illegal dumping di Desa Watugede, 1 titik illegal dumping di Desa Langlang dan 1 titik illegal dumping di Desa Klampok. Volume dari masing-masing titik illegal dumping bervariasi, untuk volume illegal dumping di Desa Watugede memiliki volume sebesar $0,60\text{m}^3$ dan $0,36\text{m}^3$, sedangkan untuk masing titik illegal dumping di Desa Langlang sebesar $0,40\text{m}^3$ dan Desa Klampok sebesar $2,16\text{m}^3$. Masing-masing titik *illegal dumping* tersebut disebabkan karena tidak efektifnya kinerja dari sistem pengumpulan sampah yang ada di Kecamatan Singosari, sehingga masih ditemukan timbunan sampah yang tidak terangkut.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya *illegal dumping*

Munculnya *illegal dumping* di Kecamatan Singosari dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada hasil analisis yaitu:

1. Jumlah Petugas Kebersihan

Jumlah petugas kebersihan di Kecamatan Singosari masih dirasa kurang karena cakupan pelayanan yang luas serta wilayah yang luas mengakibatkan banyak wilayah yang masih belum terlayani, timbunan sampah yang berasal dari permukiman menumpuk dan tidak terangkut oleh petugas kebersihan.

2. Jumlah Ritasi

Kondisi pada Kecamatan Singosari frekuensi yang dilakukan oleh petugas kebersihan masih dirasa kurang, mayoritas petugas hanya melakukan ritasi sebanyak 1 kali, dengan frekuensi tersebut maka timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak terangkut secara optimal sehingga meninggalkan sisa sampah dan masyarakat membuang pada pekarangan atau lahan kosong.

3. Pendapatan Keluarga

Perlu adanya pengelompokan retribusi sesuai dengan pendapatan yang ada dan sosialisasi terkait biaya retribusi sampah, sehingga dalam penentuan biaya retribusi sampah dapat lebih tepat lagi dan masyarakat diharapkan mampu untuk membayar dan sampah permukiman dapat terangkut secara maksimal.

4. Jarak Rumah terhadap TPS

Semakin jauh jarak rumah terhadap TPS, semakin besar masyarakat membuang sampah sembarangan dan munculnya *illegal dumping*. Hal tersebut dikarenakan jarak yang jauh dan tanpa ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah sehingga masyarakat banyak yang menimbun sampah, membakar sampah dan membuang sampah sembarangan ke pekarangan atau lahan kosong.

5. Biaya Retribusi Sampah

Biaya retribusi di Kecamatan Singosari adalah sebesar Rp 10.000 - Rp 25.000 sedangkan jika dibandingkan dengan Kecamatan Kepanjen biaya retribusi di sana sebesar Rp 10.000 - Rp 20.000 lebih murah dibandingkan dengan Kecamatan Singosari. Oleh karena itu, perlu adanya kajian kembali terkait dengan keterkaitan biaya retribusi terhadap munculnya *illegal dumping* yaitu melihat kemampuan dari masyarakat tersebut.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja sistem pengumpulan terutama di Kecamatan Singosari karena telah ditemukan bahwa pengumpulan sampah di Kecamatan Singosari belum terlaksana secara efektif sehingga memunculkan *illegal dumping*. Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya *illegal dumping* dan menilai kinerja dari sistem pengumpulan sampah di daerah lainnya.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat di Kecamatan Singosari mengetahui permasalahan terkait pengumpulan sampah yang masih kurang efektif dan *illegal dumping* yang muncul akibat dari pengumpulan sampah dan ikut serta untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sedangkan pada masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menangani permasalahan persampahan baik dalam segi kinerja operasional maupun permasalahan *illegal dumping* yang ada di daerahnya.

5.2.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas pengumpulan sampah dan faktor yang mempengaruhi munculnya *illegal dumping*, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya yaitu dalam *zoning* lokasi yang berpotensi munculnya *illegal dumping*. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan lokasi-lokasi yang berpotensi munculnya *illegal dumping* dan penyediaan pengelolaan sampah guna mengurangi munculnya *illegal dumping*.

Pada penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi munculnya *illegal dumping*. Sebagai penyempurnaan, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengelolaan sampah *illegal dumping*. Hal ini berguna untuk

mengurangi potensi munculnya *illegal dumping* yang baru. Penelitian ini juga belum membahas secara detail keterkaitan biaya retribusi terhadap munculnya *illegal dumping*. Perbandingan biaya retribusi di Kecamatan Singosari sebesar Rp 10.000 - 25.000, sedangkan biaya retribusi di kepanjen sebesar Rp 10.000 - 20.000. Untuk penelitian selanjutnya dapat membahas keterkaitan biaya retribusi dengan *illegal dumping* yaitu melihat dari kemampuan masyarakat untuk kondisi pada umumnya.

